



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI SUARDI**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **552092**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di BONE, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 210 m2 di BONE, HIBAH TANPA AKTA Rp. 15.000.000
3. Tanah Seluas 165 m2 di KOTA PAREPARE , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. Tanah Seluas 100 m2 di BONE, HIBAH TANPA AKTA Rp. 10.000.000
5. Tanah Seluas 100 m2 di BONE, HIBAH TANPA AKTA Rp. 10.000.000
6. Tanah Seluas 60 m2 di BONE, HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.000.000
7. Tanah Seluas 200 m2 di KOTA PAREPARE , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
8. Tanah Seluas 112 m2 di BANTAENG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
9. Tanah Seluas 126 m2 di BANTAENG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/157 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 805.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/150 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 145.000.000



1. MOBIL, DAIHATSU SIGRA 1200 CC Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	520.937.338
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.415.937.338
III. HUTANG	Rp.	893.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.522.337.338

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.